

## **NOTULA**

### **Rapat Pembahasan Usulan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2020-2022 terkait Keterbukaan Informasi Kualitas Air Minum**

#### **I. Pelaksanaan Kegiatan**

|               |  |
|---------------|--|
| Hari, Tanggal | : Rabu, 9 September 2020   |
| Pukul         | : 10.00 – 12.00 WIB  |
| Tempat        | : Zoom Meeting Room  |
| Agenda        | : 1. Penyampaian usulan Rencana Aksi CRPG<br>2. Pembahasan Rencana Aksi CRPG   |
| Peserta       | : 1. Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes<br>2. Direktorat Air Minum Kementerian PUPR<br>3. Direktorat KGM Bappenas<br>4. Direktorat Perkotaan dan Permukiman Bappenas<br>5. Tim CRPG (Center for Regulation Policy and Governance)<br>6. Tim Sekretariat Nasional OGI |

#### **II. Diskusi**

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan terkait Open Government Indonesia
  - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
  - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama

dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Perwakilan CRPG memberikan paparan terkait usulan rencana aksi Keterbukaan dan Publikasi Data Air Minum.
  - a. Usulan ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang mana konsumen tidak mengetahui data terkait air minum dan PAM tidak memiliki kapasitas untuk menganalisis kualitas air minum.
  - b. CRPG mengusulkan beberapa target yang ingin dicapai dalam rencana aksi, di antaranya adanya pelatihan *water safety audit* agar penyedia air minum memiliki kapasitas dalam mengecek kualitas air minum. Selain itu, adanya publikasi data air minum aman dan RPAM di 20 (dua puluh) Penyedia Air Minum.
3. Ibu Riche dari Direktorat Air Minum Kementerian PUPR menyatakan beberapa poin tentang keterbukaan informasi Air Minum.
  - a. Perlu adanya keterlibatan Kementerian Dalam Negeri karena air minum yang terkait dengan pelayanan dasar adalah kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan penyediaan SPAM lintas daerah. Sementara itu, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penyediaan SPAM lintas negara. Selain itu, tarif juga merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
  - b. BPPSPAM sudah tidak lagi diakui. Saat ini, sedang ada proses untuk mematangkan konsep pembagian peran seperti peran pembinaan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sebagian peran lainnya diampu oleh Kementerian PUPR.
  - c. Kelompok masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM. Badan usaha yang bergerak di dalam pemenuhan kebutuhan air juga dapat menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di wilayah kerjanya.
  - d. Saat ini, kewenangan air baku berada di bawah Ditjen SDA. Kualitas di hulu sudah dipastikan dengan adanya proses uji. Namun, pencemaran sering terjadi di sisi hilir yakni jaringan distribusi. Terlebih, kapasitas SDM di hilir untuk mengecek kualitas juga kurang. Saat ini, cakupan perpipaan juga hanya 20,8%. Status BUMD dengan kinerja sehat pun hanya 59%.
  - e. Kementerian PUPR memiliki rencana Water Safety Plan. Awalnya, di tahun 2011, belum ada penentuan siapa yang bertanggung jawab mengawal hulu terkait sumber air baku. Di tahun 2017

hingga 2018, ada penyesuaian RPAM yang dibuat per operator. Terkait kelembagaan, PUPR mengampu hal teknis dimana Kemenkes terkait kualitas air dan Kemendagri terkait pengelola atau operator PAM di daerah dan pemerintah daerah. Namun, belum ada *legal ground* untuk mengamandatkan penerapan RPAM.

- f. Perlu adanya peran pengawasan eksternal dari dinas kesehatan kabupaten dan kota. Namun, pengawasan ini yang seringkali terkendala dana. Sementara itu, PDAM bertanggung jawab atas pengawasan internal.
4. Ibu Ely dari Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan menyampaikan beberapa poin terkait air minum aman.
- a. Perlu adanya perlindungan masyarakat dalam mengonsumsi air minum aman. Oleh karena itu, adanya akses publik untuk mengetahui kualitas air minum setiap saat akan membantu dalam melindungi masyarakat.
  - b. Terkait target teknis, perlu adanya identifikasi apakah setiap proses distribusi sudah terpantau dengan baik. Oleh karena itu, pengelola PAM perlu mendapatkan pelatihan dan informasi yang cukup. Saat ini, penilaian kualitas air masih belum mendapatkan perhatian yang besar.
  - c. Hasil diskusi dengan PAM Jakarta, ada kewajiban pengawasan eksternal untuk menguji kualitas air sampai pada titik akhir. Biaya pengujian ini juga tidak seharusnya dibebankan pada peminta data kualitas air minum, karena pemerintah daerah bertanggung jawab atas hal ini.
  - d. Kampanye agar seluruh penyelenggara menjalankan RPAM seharusnya sudah berjalan di tahun 2021. Terkait hal ini, Kemenkes akan mengeluarkan pedoman praktis karena komunitas juga bagian dari penyelenggara Air Minum.
5. Bapak Agusta dari Direktorat Perkotkim Bappenas menyampaikan beberapa poin target capaian untuk air minum.
- a. Usulan ini akan meningkatkan pencapaian target SDGs. Selain itu, dalam target RPJMN 2020-2024, ada 100 Kabupaten Kota yang harus melaksanakan SPAM dan 514 kabupaten kota melakukan pengawasan. Jangka panjangnya, tersedia air prima yang bisa langsung diminum
  - b. Pemenuhan PKM dapat di support oleh SKM Kemenkes. Survei tahun ini masih dalam skala provinsi.

### III. Tindak Lanjut

1. Rapat selanjutnya akan diadakan untuk membahas hal teknis terkait penajaman rencana aksi dengan mengundang BUMD, BLUD, BMD Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Ditjen Keuda juga akan diundang untuk membicarakan terkait anggaran pengujian kualitas air minum, KLHK dan Kementerian Pertanian juga akan diundang dalam rapat pembahasan teknis selanjutnya.

### IV. Dokumentasi

